

ANALISIS “DISECONOMIES OF SCALE” DAN DAYA SAING KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA

Alkadri

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT, Jakarta

Abstract

During 2000-2005 period, Gerbangkertosusila Area (G-12 Area) in East Java Province has been growth rapidly. But, hypothetically, this area fall in diseconomies of scale and competitiveness decreasing at national level. Using the regional diseconomies of scale and regional competitiveness approachs, this paper analyzed the hypothetic of diseconomies of scale and competitiveness decreasing in G-12 Area. The result of analysis show that G-12 Area has been diseconomies of scale and competitiveness decreasing in many macroeconomic indicators, i.e. contribution of gross value added, income per capita, contribution of export, absorption of domestic and foreign investment, quantity of medium and large scale industries, and fiscal capacity.

Kata kunci : *Diseconomies of scale, daya saing, kawasan gerbangkertosusila*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Kawasan Gerbangkertosusila mampu memperlihatkan perkembangan yang dinamis dan cepat tumbuh, tidak hanya di seputar Provinsi Jawa Timur, tetapi juga di tingkat nasional. Kontribusinya terhadap PDB maupun ekspor nasional cukup signifikan. Begitu juga halnya dengan daya serapnya terhadap investasi, baik PMDN maupun PMA.

Kawasan Gerbangkertosusila pada mulanya terdiri atas tujuh kabupaten/kota, yakni Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan (selanjutnya disebut Kawasan G-7). Dalam perkembangannya, Kawasan G-7 makin terintegrasi dengan lima kabupaten/kota lain di sekelilingnya, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan (seterusnya dinamakan Kawasan G-5). Menguatnya integrasi antara Kawasan G-7 dan Kawasan G-5 ini akhirnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai salah satu dari sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, Kawasan Gerbangkertosusila saat ini menjadi sembilan kabupaten dan tiga kota (berikutnya disingkat Kawasan G-12).

Akan tetapi, di balik perkembangannya yang dinamis, cepat tumbuh, dan menguatnya integrasi tersebut, diduga telah terjadi *diseconomies of scale* dan penurunan daya saing Kawasan G-12 di

tingkat nasional. Tulisan ini akan menganalisis dugaan tersebut melalui penelusuran perkembangan beberapa indikator ekonomimakro yang telah diraih Kawasan G-12 dalam beberapa tahun terakhir. Indikator ekonomimakro tersebut di antaranya adalah perkembangan nilai tambah bruto, pendapatan per kapita, perdagangan luar negeri (khusus ekspor), investasi, jumlah industri besar/średang, dan peringkat kapasitas fiskal.

2. BAHAN DAN METODE

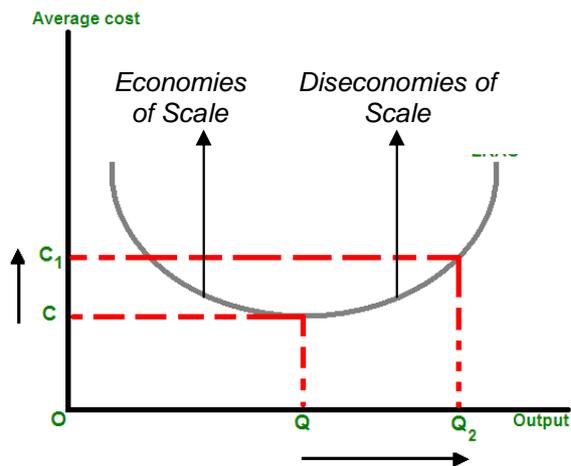
Untuk menjawab dugaan di atas, digunakan dua pendekatan teoretis, yakni *regional diseconomies of scale* dan daya saing kawasan (*regional competitiveness*).

2.1. "Regional Diseconomies of Scale"

Menurut konsep ekonomi, *diseconomies of scale*, atau lebih dikenal dengan istilah *decreasing return of scale*, merujuk pada suatu situasi dimana dalam jangka panjang biaya rata-rata (*long run average cost*) yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan satu unit barang atau jasa mengalami peningkatan (<http://encyclopedia.thefreedictionary.com>). Artinya, semakin banyak produk yang dihasilkan, kian bertambah besar biaya rata-rata yang harus ditanggung sebuah perusahaan (perhatikan Gambar 1).

Penyebab terjadinya *diseconomies of scale* bisa bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. *Internal diseconomies of scale* antara

lain berupa ketergantungan (*interdependency*) antarunit produksi terputus, sehingga secara keseluruhan menyebabkan lini produksi sempat terhenti; terputusnya koordinasi dan komunikasi dari *top management* ke unit produksi, dan sebaliknya; serta meningkatnya perselisihan antarperusahaan yang menyebabkan kesinambungan proses produksi terganggu. Sedangkan *external diseconomies of scale* akan muncul apabila terjadi kelangkaan faktor produksi, sehingga pada gilirannya biaya dan harga output mengalami kenaikan (<http://www.cr1.dircon.co.uk>).



Sumber : <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>.

Gambar 1. Kondisi *Diseconomies of Scale*

Apabila *diseconomies of scale* pada level perusahaan di atas diakumulasi atau diintegrasikan ke level sebuah regional atau kawasan, maka *regional diseconomies of scale* yang dialami kawasan tersebut akan tergambar pada perkembangan berbagai indikator ekonomimakro dalam jangka waktu tertentu.

2.2. Daya Saing Kawasan

Daya saing (*competitiveness*) dapat didefinisikan pada level perusahaan, industri, regional, dan nasional (Altenburg, Tilman, Wolfgang Hillebrand, and Jorg Meyer-Stamer, 1998; OECD, 2005).

Di tingkat perusahaan (*firm*), daya saing adalah kemampuan untuk menyediakan barang dan/atau jasa lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan pesaing secara berkelanjutan tanpa proteksi dan subsidi. Di sini, daya saing perusahaan dapat diukur antara lain dari tingkat penguasaan pangsa pasar ekspor di tingkat nasional dan internasional.

Pada level industri (*industry*), daya saing merupakan kemampuan sekumpulan perusahaan sejenis di suatu negara mencapai sukses secara berkesinambungan dibandingkan pesaingnya dari

luar negeri tanpa proteksi dan subsidi. Indikator daya saing industri di antaranya adalah neraca perdagangan luar negeri sektor industri yang bersangkutan.

Di tingkat nasional, daya saing berarti kemampuan masyarakat untuk mencapai standar hidup yang tinggi dan senantiasa meningkat. Daya saing nasional bisa pula didefinisikan sebagai suatu tingkat dimana barang dan jasa suatu negara mampu menembus pasar internasional dan secara simultan bisa memelihara dan meningkatkan pendapatan riil masyarakatnya dalam jangka panjang.

Dewasa ini, konsep daya saing berkembang ke tingkat regional atau kawasan. Analisis daya saing kawasan (*regional competitiveness*) didasarkan pada kombinasi antara keuntungan kompetitif perusahaan (*the competitive advantage of firms*) dan keuntungan komparatif ekonomi kawasan (*the comparative advantage of a regional economy*) (Budd, L. and Hirmis A. K., 2004). Dengan kombinasi seperti ini, peningkatan daya saing regional difokuskan pada kemampuan meningkatkan dan memelihara kesuksesan perusahaan serta meningkatkan standar hidup penduduk kawasan tersebut.

Perluasan konsep daya saing ke level regional mendatangkan perubahan pada arah kebijakan pembangunan regional. Sebelumnya, kebijakan pembangunan regional berupaya membuat kawasan itu lebih bersaing melalui pengembangan perusahaan berskala internasional. Sedangkan sekarang ini kebijakan pembangunan regional difokuskan pada bagaimana menciptakan perusahaan domestik yang lebih kompetitif melalui spesialisasi dan kluster industri tertentu. Karena itu, untuk membangun perusahaan domestik yang kompetitif, sebuah kawasan harus mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya, baik sumberdaya fisik maupun nonfisik.

Menurut konsep *resource-based approach* (RBA), daya saing (*competitiveness*) sebuah kawasan dapat diartikan sebagai serangkaian kemampuan kawasan tersebut menciptakan nilai tambah di atas rata-rata (*above average added value*) (Kuncoro, Mudrajad, 2005). Untuk menciptakan nilai tambah di atas rata-rata, ada dua variabel yang harus dikelola, yakni sumberdaya (*resources*) dan kapabilitas (*capability*). Sumberdaya terdiri dari sumberdaya fisik dan sumberdaya nonfisik. Sumberdaya fisik dapat berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan sumberdaya nonfisik bisa berbentuk budaya, norma, visi, dan pengalaman. Sementara itu, kapabilitas terdiri dari teknologi dan kebijakan (regulasi). Dengan kedua variabel ini, dapat dibentuk kompetensi inti (*core*

competence) yang nantinya menjadi karakteristik atau ciri khas suatu kawasan. Melalui kompetensi inti inilah kawasan itu menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan daya saingnya.

Seperti halnya *diseconomies of scale*, perkembangan daya saing kawasan dapat pula dilihat – antara lain – dari kinerja pembangunan ekonomimakro kawasan yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis "Diseconomies Of Scale" Dan Daya Saing Kawasan Gerbangkertosusila

Sebagaimana dikemukakan di atas, berikut ini dapat disimak analisis *diseconomies of scale* dan daya saing ekonomimakro Kawasan G-12 di level nasional selama kurun waktu 2000-2005. Sekali lagi, Kawasan G-12 dipilah menjadi Kawasan G-7 dan Kawasan G-5.

3.2. Nilai Tambah Bruto

Kinerja perusahaan-perusahaan, masyarakat, dan pemerintah di sebuah kawasan dalam menghasilkan barang dan jasa dapat dilihat dari nilai tambah bruto (*gross value added*, NTB) yang telah dihasilkan sepanjang jangka waktu tertentu. NTB tersebut dituangkan dalam bentuk produk domestik regional bruto (PDRB). Dari perkembangan PDRB, dapat diukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi suatu kawasan terhadap wilayah yang lebih luas.

Berdasarkan harga konstan 2000, nilai PDRB Kawasan G-7 telah bertambah dari Rp88.565,81 miliar tahun 2000 menjadi Rp115.834,44 miliar pada 2005 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2006). Pertambahan ini telah mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Kawasan G-7 meningkat dari 4,44% tahun 2001 menjadi 6,16% tahun 2005. Selama periode 2000-2005 ini, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kawasan G-7 adalah 5,52% setahun. Angka ini lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai rata-rata 4,71% per tahun (IMF, 2006). Sementara itu, untuk periode waktu yang sama, PDRB Kawasan G-5 bertambah dari Rp16.817,41 miliar menjadi Rp20.675,28 miliar. Artinya, Kawasan G-5 telah meraih pertumbuhan ekonomi sekitar 2,94% tahun 2001 dan terus meningkat hingga 5,01% tahun 2005, atau tumbuh rata-rata 4,22% setahun. Angka ini ternyata masih di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional maupun Kawasan G-7.

Dengan tingkat pertumbuhan seperti di atas, kontribusi PDRB Kawasan G-7 terhadap PDB

(Produk Domestik Bruto) nasional bertambah dari 6,37% menjadi 6,62%. Sebaliknya, kontribusi Kawasan G-5 merosot sedikit dari 1,21% menjadi 1,18% selama kurun waktu yang sama.

Dimasukkannya Kawasan G-5 untuk melengkapi Kawasan G-7 menjadi Kawasan G-12 memunculkan pertanyaan, apakah penambahan lima kabupaten/kota tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong peningkatan kontribusi Kawasan G-12 lebih besar dari Kawasan G-7? Laju pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh Kawasan G-12 memang memperlihatkan tren meningkat dari tahun ke tahun, tepatnya dari 4,20% tahun 2001 menjadi 5,99% tahun 2005, atau rata-rata 5,31% setiap tahunnya. Akan tetapi, ternyata angka ini masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kawasan G-7 (5,52% per tahun). Dengan demikian, penambahan Kawasan G-5 untuk memperluas Kawasan G-7 menjadi Kawasan G-12 belum mampu memberikan pengaruh yang positif untuk mengangkat laju pertumbuhan ekonomi Kawasan G-12 melebihi Kawasan G-7.

Di sisi lain, secara agregat PDRB Kawasan G-5 memang mampu menambah kontribusi PDRB Kawasan G-12 menjadi lebih besar di dalam komposisi PDB nasional. Akan tetapi, peranan PDRB Kawasan G-5 di dalam PDB nasional cenderung menurun, yakni dari 1,21% menjadi 1,19%. Hal ini bertolak belakang dengan kontribusi PDRB Kawasan G-7. Artinya, selama jangka waktu 2000-2005 penambahan Kawasan G-5 ke dalam Kawasan G-7 untuk menjadi Kawasan G-12 telah menimbulkan *diseconomies of scale* dalam hal kontribusi nilai tambah bruto. Akibatnya, daya saing Kawasan G-12 di tingkat nasional mengalami kemerosotan.

3.3. Pendapatan per Kapita

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang telah diraih Kawasan G-12, tingkat produktivitas masyarakat di kawasan ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2000 PDRB per kapita Kawasan G-7 baru sekitar Rp8.250 ribu, tetapi pada tahun-tahun berikutnya semakin bertambah besar hingga mencapai Rp16.303 ribu tahun 2005. Dengan demikian, produktivitas masyarakat Kawasan G-7 meningkat rata-rata 14,62% per tahun. Sementara itu, pendapatan per kapita Kawasan G-5 naik dari Rp3.552 ribu menjadi Rp6.673 ribu, atau tumbuh rata-rata 13,46% setahun. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita Kawasan G-12 bertambah dari Rp5.901 ribu menjadi Rp11.488 ribu dalam periode yang sama, dengan laju pertumbuhan rata-rata 14,27% setiap tahunnya (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2006).

Akan tetapi, dengan tingkat pertumbuhan seperti di atas, muncul dua permasalahan. Pertama, kesenjangan pendapatan per kapita (*income per capita gap*) antara masyarakat di Kawasan G-7 dan masyarakat di Kawasan G-5 semakin melebar. Jika pada tahun 2000 *gap* tersebut masih sekitar Rp4.698,38 ribu, maka memasuki tahun 2005 kesenjangan tadi sudah melebar hingga Rp9.630,85 ribu. Makin melebarnya kesenjangan pendapatan per kapita antara Kawasan G-7 dan Kawasan G-5 ini lebih jauh telah menyebabkan tingkat perkembangan ekonomi di antara kedua kawasan semakin tidak seimbang, meskipun integrasi di antara mereka kian menguat.

Kedua, penggabungan Kawasan G-5 ke dalam Kawasan G-7 untuk menjadi Kawasan G-12 juga telah mendatangkan dampak negatif, yakni berupa lebih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan G-12 dibandingkan penduduk di Kawasan G-7. Bahkan, pendapatan per kapita Kawasan G-12 menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita nasional, dengan rasio 88,81 pada tahun 2000 dan 93,77 pada tahun 2005. Pendapatan per kapita nasional itu sendiri dalam jangka waktu bersamaan naik dari Rp6.644 ribu menjadi Rp12.251 ribu (IMF, 2006).

Dengan demikian, melebarnya kesenjangan pendapatan per kapita antara Kawasan G-7 dan Kawasan G-5 serta lebih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Kawasan G-12 dibandingkan pendapatan per kapita nasional, mengindikasikan bahwa sepanjang periode 2000-2005 lalu Kawasan G-12 tengah mengalami *diseconomies of scale* pengelolaan sumberdaya dan penurunan produktivitas (daya saing) di tingkat nasional.

3.4. Ekspor

Selama bentang waktu 2000-2005, perkembangan ekspor Kawasan G-7 sempat memperlihatkan tren menurun pada tahun 2001-2002, namun setelah itu mampu bangkit lagi. Pada tahun 2000 nilai ekspor Kawasan G-7 sudah mencapai US\$5.670 juta, namun dua tahun kemudian turun menjadi US\$5.169 juta. Memasuki tahun 2003 hingga 2005, ekspor Kawasan G-7 kembali meningkat mencapai US\$7.117 juta (BPS, beberapa edisi). Dengan demikian, ekspor Kawasan G-7 mengalami laju pertumbuhan rata-rata 5,01% per tahun. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekspor Kawasan G-5 jauh lebih tinggi, yakni mencapai rata-rata 52,18% per tahun (naik dari US\$68,6 juta menjadi US\$280,7 juta), namun perkembangannya sangat berfluktuatif.

Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekspor Kawasan G-12 selama rentang waktu

2000-2005 di atas adalah sebesar 5,62% setahun, tepatnya naik dari US\$5.739 juta menjadi US\$7.397 juta. Di sini terlihat, bahwa penggabungan Kawasan G-5 dan Kawasan G-7 telah mendatangkan dampak positif, yakni mampu meningkatkan daya saing Kawasan G-12 di level nasional.

Meskipun laju pertumbuhan ekspor Kawasan G-5 sangat tinggi, namun kontribusinya terhadap ekspor nasional sangat kecil. Selama periode 2000-2005, kontribusi ekspor Kawasan G-5 di level nasional meningkat dari 0,11% menjadi 0,32%, atau rata-rata 0,18% per tahun. Sebaliknya *share* ekspor Kawasan G-7 jauh lebih besar, namun cenderung menurun, yakni dari 9,13% menjadi 8,21%, atau 8,80% setiap tahun. Di sini terlihat bahwa peningkatan kontribusi ekspor Kawasan G-5 ternyata belum mampu menahan penurunan sumbangan ekspor Kawasan G-12 secara keseluruhan. Dalam periode yang sama, kontribusi Kawasan G-12 terhadap ekspor nasional merosot dari 9,24% menjadi 8,54%.

Dengan demikian, dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor nasional, Kawasan G-12 mengalami *diseconomies of scale* dan penurunan daya saing, terutama terjadi di Kawasan G-7.

3.5. Investasi

3.5.1. Daya Serap PMDN dan PMA

Dari Tabel 1 terlihat bahwa rencana penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kawasan G-7 yang disetujui pemerintah hingga bulan Juli 2006 secara agregat sudah mencapai Rp49.289,5 miliar (673 proyek), yang berarti sekitar 4,42% dari total investasi yang disetujui pemerintah sebanyak Rp1.115.297 miliar (14.218 proyek). Sedangkan daya serap Kawasan G-7 terhadap rencana penanaman modal asing (PMA) mencapai US\$9.430,9 juta (719 proyek) atau 3,22% dari rencana PMA nasional yang mencapai US\$293.144,0 juta (16.304 proyek) untuk kurun waktu yang sama (BPM Provinsi Jawa Timur, 2006; BKPM, 2006). Sementara itu, khusus untuk Kawasan G-5, kumulatif nilai dan proyek investasi domestik dan asing yang telah diserap masing-masing mencapai Rp18.700,5 miliar (287 proyek) dan US\$8.024,5 juta (147 proyek). Berarti, daya serap kawasan ini terhadap PMDN dan PMA nasional yang disetujui pemerintah masing-masing adalah 1,68% dan 2,74%.

Khusus untuk periode Januari-Juli 2006, jumlah PMDN yang masuk ke Kawasan G-12 adalah senilai Rp2.918,2 miliar yang terbagi di Kawasan G-7 sebanyak Rp1.914,0 miliar dan Kawasan G-5 sejumlah Rp1.004,2 miliar.

Dengan demikian, secara kumulatif penambahan Kawasan G-5 ke Kawasan G-7 membuat PMDN dan PMA yang masuk ke Kawasan G-12 masing-masing mencapai 6,10% dan 6,14% dari PMDN dan PMA nasional. Jika dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di Indonesia, seperti Kawasan Batam-Bintan-Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dan Kawasan Jabodetabek di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten (BKPM, 2006), maka hasil penyerapan PMDN dan PMA yang diraih oleh Kawasan G-12 di atas termasuk rendah. Artinya, daya saing Kawasan G-12 di tingkat nasional masih relatif lemah.

Selanjutnya, di Kawasan G-12 itu sendiri, sebagian besar PMDN diserap oleh Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten/Kota Pasuruan. Sebagaimana tampak pada Tabel 1, sampai dengan Juli 2006 lalu PMDN yang disetujui pemerintah untuk Kota Surabaya telah mencapai angka Rp21.260,5 miliar (31,27%) dan 405 proyek (42,19%). Sedangkan Kabupaten Sidoarjo menduduki posisi kedua dengan menyerap PMDN sebanyak Rp19.008,6 miliar (27,96%) dan 186 proyek (19,38%). Kedua daerah ini sekaligus mendominasi penyerapan PMDN hingga 81,70% untuk lingkup Kawasan G-7. Sementara itu, Kabupaten dan Kota Pasuruan secara bersama mendapat PMDN senilai Rp16.614,4 miliar (24,44%) dan 270 proyek

(28,13%), untuk mendominasi penyerapan PMDN hingga 88,84% di lingkup Kawasan G-5. Daerah yang paling rendah daya serapnya terhadap PMDN adalah Kabupaten Bojonegoro, yakni hanya Rp15,7 miliar (3 proyek) selama rentang waktu 1968-Juli 2006.

Berbeda halnya dengan PMDN, sebagian besar nilai PMA diserap oleh Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik, yakni masing-masing US\$5.734,2 juta (32,85%) dan US\$4.348,6 juta (24,91%). Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Kota Surabaya dengan PMA senilai US\$3.044,1 juta. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo hanya menempati urutan kelima dengan US\$1.230,1 juta, setelah Kabupaten/Kota Pasuruan yang berhasil meraih PMA sejumlah US\$2.150,7 juta. Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang paling rendah daya serapnya terhadap PMA, yakni hanya US\$1,5 juta selama rentang waktu 1967-Juli 2006 di atas.

3.5.2. Peringkat Daya Saing Investasi

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerja sama dengan USAID dan *The Asian Foundation* setiap tahun mengeluarkan hasil pemeringkatan daya saing investasi untuk ratusan kabupaten/kota di Indonesia. Khusus untuk Kawasan G-12, peringkat daya saing investasi kabupaten/kota di kawasan ini dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 1. Persentase PMDN dan PMA yang Disetujui Pemerintah di Kawasan G-7, Kawasan G-5, dan Kawasan G-12 Terhadap Nasional, Hingga Juli 2006

Kawasan	PMDN				PMA			
	1968-Juli 2006		Persentase terhadap Indonesia (%)		1967-Juli 2006		Persentase terhadap Indonesia (%)	
	Proyek	Nilai (Rp miliar)	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai (US\$ juta)	Proyek	Nilai
Kawasan G-7	673	49.289,5	4,73	4,42	719	9.430,9	4,41	3,22
Kab. Gresik	12	6.011,5	0,08	0,54	115	4.348,6	0,71	1,48
Kab. Bangkalan	8	71,9	0,06	0,01	1	1,9	0,01	0,00
Kab/Kota Mojokerto Surabaya	56	2.705,9	0,39	0,24	95	804,7	0,58	0,27
Kab. Sidoarjo	186	19.008,6	1,31	1,70	134	1.230,1	0,82	0,42
Kab. Lamongan	6	231,1	0,04	0,02	2	1,5	0,01	0,00
Kawasan G-5	287	18.700,5	2,02	1,68	147	8.024,5	0,90	2,74
Kab. Bojonegoro	3	15,7	0,02	0,00	5	7,0	0,03	0,00
Kab. Tuban	6	1.576,6	0,04	0,14	16	5.734,2	0,10	1,96
Kab. Jombang	8	493,8	0,06	0,04	5	132,6	0,03	0,05
Kab/Kota Pasuruan	270	16.614,4	1,90	1,49	121	2.150,7	0,74	0,73
Kawasan G-12	960	67.990,0	6,75	6,10	866	17.455,3	5,31	5,95
Indonesia	14.218	1.115.297,0	100,00	100,00	16.304	293.144,0	100,00	100,00

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, 2006, *Data Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur*, diolah.

Tabel 2. Peringkat Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Kawasan G-12 Ditinjau dari Faktor Ekonomi Daerah, 2005 dan 2003

Kabupaten/Kota	Potensi Ekonomi **	Struktur Ekonomi ***	Total Ekonomi Daerah #	Peringkat	
				2005	2003
Kab. Gresik	B	A	A	5	17
Kab. Bangkalan	D	C	C	66	136
Kab. Mojokerto	C	C	C	68	85
Kab. Sidoarjo	D	A	D	7	21
Kab. Lamongan	C	E	D	130	128
Kab. Tuban *					
Kab. Bojonegoro *					
Kab. Jombang	A	C	C	52	122
Kab. Pasuruan	D	D	D	111	145
Kota Surabaya	E	A	A	14	18
Kota Mojokerto	E	A	A	21	37
Kota Pasuruan *					

Catatan :

* Tidak dimasukkan dalam pemeringkatan.

** Variabelnya terdiri dari PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks kemahalan konstruksi. Diberi subbobot 22%.

*** Variabelnya meliputi pertumbuhan sektor primer, pertumbuhan sektor sekunder, dan pertumbuhan sektor tersier. Diberi subbobot 78%.

Dari lima faktor yang dikaji, faktor ini diberi bobot 23%.

Sumber : KPPOD (2005, 2003).

Berdasarkan faktor ekonomi daerah, dimana indikator yang dipakai adalah potensi ekonomi dan struktur ekonomi, pada tahun 2005 lalu hanya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo di Kawasan G-12 yang menempati peringkat sepuluh besar, tepatnya di urutan kelima dan ketujuh. sedangkan kabupaten/kota lainnya menduduki posisi di luar sepuluh besar (KPPOD, USAID, dan The Asian Fondation, 2005). Di Kawasan G-12 itu sendiri, peringkat daya saing investasi yang diraih Kawasan G-7, kecuali Kabupaten Bangkalan, lebih baik dibandingkan Kawasan G-5.

Jika dibandingkan dengan posisi tahun 2003, peringkat daya tarik investasi sembilan kabupaten/kota di Kawasan G-12 ini seluruhnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan (KPPOD, USAID, dan The Asian Fondation, 2003). Namun demikian, meskipun peringkat daya saingnya meningkat, ternyata nilai investasi yang masuk ke kawasan ini relatif rendah dibandingkan kawasan-kawasan lain di Indonesia.

3.6. Industri Besar/Sedang

Jumlah industri skala besar/sedang di Kawasan G-12 memperlihatkan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2003, namun setelah itu kembali meningkat hingga tahun 2005. Di Kawasan G-12 industri besar/sedang pada mulanya berkurang dari 2.963 unit (2001) menjadi 2.777 unit (2003), kemudian meningkat lagi hingga mencapai 2.852 unit pada tahun 2005 (Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2006).

Apabila ditelusuri lebih jauh, ada beberapa kabupaten/kota di Kawasan G-12 yang mengalami penurunan jumlah industri selama rentang waktu di atas. Di antaranya adalah Kabupaten Lamongan, dimana industri besar/sedang berkurang dari 216 unit tahun 2001 menjadi 158 unit tahun 2005, yang berarti mengalami penurunan rata-rata 7,33% per tahun (simak Tabel 3). Selain Kabupaten Lamongan, penurunan jumlah industri besar/sedang juga terjadi di Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya, dan Kota Pasuruan. Sebaliknya, kabupaten/kota yang jumlah industri besar/sedangnya meningkat terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Mojokerto.

Tabel 3. Jumlah Industri Besar/Sedang di Kawasan G-7, Kawasan G-5, Kawasan G-12, dan Indonesia, 2001-2005

Kabupaten/ Kota	2001	2002	2003	2004	2005	Laju Rata2 (%)
JUMLAH INDUSTRI (unit)						
Kawasan G-7	2.212	2.195	2.065	2.101	2.078	(1,51)
Gresik	451	437	389	396	394	(3,20)
Bangkalan	17	15	19	19	20	5,04
Kab Mojokerto	176	179	178	181	177	0,16
Kota Mojokerto	32	32	29	30	39	6,02
Surabaya	677	680	651	662	623	(2,01)
Sidoarjo	643	659	618	629	667	1,02
Lamongan	216	193	181	184	158	(7,33)
Kawasan G-5	751	741	712	725	774	0,83
Bojonegoro	36	26	29	30	35	0,97
Tuban	111	100	92	94	105	(1,01)
Jombang	111	119	109	111	118	1,74
Kab Pasuruan	412	422	412	419	441	1,75
Kota Pasuruan	81	74	70	71	75	(1,75)
Kawasan G-12	2.963	2.936	2.777	2.826	2.852	(0,91)
Indonesia	53.033	61.066	61.749	70.386	71.936	8,11
PERSENTASE TERHADAP INDONESIA (%)						
Kawasan G-7	4,17	3,59	3,34	2,98	2,89	
Kawasan G-5	1,42	1,21	1,15	1,03	1,08	
Kawasan G-12	5,59	4,81	4,50	4,02	3,96	

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur, *Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2005*; Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Statistik Usaha Kecil dan Menengah 2005*; diolah.

Secara keseluruhan, selama rentang waktu 2001-2005, persentase jumlah industri besar/sedang yang terdapat di Kawasan G-12 menurun dari 5,59% menjadi 3,96% dari total industri besar/sedang di seluruh Indonesia (Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2005). Dengan demikian, dari segi pertumbuhan kontribusi jumlah industri besar/sedang di level nasional, Kawasan G-12 telah mengalami penurunan daya saing.

Penurunan yang cukup signifikan ini terutama diakibatkan oleh berkurangnya jumlah industri besar/ sedang di Kawasan G-7 dari 2.212 unit (2001) menjadi 2.078 unit (2005). Sementara itu, penambahan jumlah industri besar/ sedang di Kawasan G-5 dari 751 unit menjadi 774 unit tidak mampu menahan penurunan jumlah industri besar/ sedang di Kawasan G-12.

3.7. Kapasitas Fiskal

Di sisi lainnya, di tingkat nasional kapasitas fiskal kabupaten/kota di Kawasan G-12 sebagian besar berkategori rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan indeks kapasitas fiskal yang dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pada tahun 2005 lalu, indeks kapasitas fiskal seluruh kabupaten di Kawasan G-12 yang berkategori rendah adalah Bangkalan (0,1141), Bojonegoro (0,1239), Gresik (0,1878), Jombang (0,1550), Lamongan (0,1324), Mojokerto (0,2601), Pasuruan (0,2301), Sidoarjo (0,3571), dan Tuban (0,1659). Sedangkan indeks kapasitas fiskal Kota Pasuruan (0,9948) dan Kota Surabaya (0,8332) termasuk kategori sedang. Sementara itu, Kota Mojokerto menjadi satu-satunya daerah di Kawasan G-12 yang mempunyai indeks kapasitas fiskal berkategori tinggi (1,2015) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2005). Di sini terlihat bahwa lima kabupaten di Kawasan G-7 dan empat kabupaten di Kawasan G-5 sama-sama memberikan kontribusi kepada rendahnya kapasitas fiskal Kawasan G-12 secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan pada tahun 2003, kapasitas fiskal ke-12 kabupaten/kota di Kawasan G-12 di atas tidak ada yang mengalami peningkatan (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 538/KMK.07/2003).

3.8. Implikasi Kebijakan

3.8.1. Skenario Peningkatan Daya Saing Kawasan Gerbangkertosusila

Dari uraian di atas terlihat bahwa peranan Kawasan G-12 dalam perekonomian nasional cukup signifikan, baik dalam hal ekspor, daya serap investasi, nilai tambah bruto, maupun jumlah industri besar/ sedang. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir peranan tersebut cenderung menurun, terutama dalam hal kontribusi ekspor, pendapatan per kapita kapasitas fiskal, dan industri besar/ sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing Kawasan G-12 di tingkat nasional cenderung melemah dalam beberapa aspek, dan hal ini harus diatasi segera.

Untuk memperkuat kembali daya saing Kawasan G-12, maka pembangunan kawasan ini harus di-*setting* kembali. Caranya adalah dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal di keduabelas kabupaten/kota di Kawasan G-12 hingga kelipatan tertentu sesuai dengan tren pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal setiap daerah. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut harus diakselerasi, dapat dilihat dari hasil proyeksi yang disajikan dalam Tabel 4.

Dari Tabel 4 tampak bahwa untuk mendongkrak kembali daya saingnya di level nasional, Kawasan G-12 membutuhkan akselerasi laju pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 5,31% (2001-2005) menjadi rata-rata 8,87% (2006-2015) per tahun. Angka proyeksi sebesar ini lebih tinggi dibandingkan estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hingga tahun 2015 nanti diproyeksikan berkisar 6,0-6,5 persen per tahun.

Tabel 4. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota di Kawasan G-12, 2006-2015 (%)

Kabupaten/Kota	Rata2 LPE 2001-2005	Rata2 Proyeksi LPE 2006-2015
Gresik	5,81	10,04
Bangkalan	3,87	6,71
Kab Mojokerto	4,47	8,76
Kota Mojokerto	6,20	7,47
Surabaya	5,82	9,13
Sidoarjo	5,04	8,07
Lamongan	4,26	8,88
Bojonegoro	3,73	5,34
Tuban	4,35	9,98
Jombang	4,44	10,54
Kab Pasuruan	4,08	6,80
Kota Pasuruan	5,58	9,64
Kawasan G-12	5,31	8,87

Sumber : Hasil perhitungan dan proyeksi (2006).

Dengan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi seperti di atas, serta ICOR rata-rata 4,10 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2006), maka besarnya nilai investasi yang harus dicapai oleh ke-12 kabupaten/kota untuk kurun waktu 2006-2015 dapat disimak pada Tabel 5.

Di samping *peningkatan daya saing*, aspek *keseimbangan pembangunan antarwilayah* di Kawasan G-12 juga diperhatikan dalam mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di atas. Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya, telah terjadi ketidakseimbangan kemajuan pembangunan di antara 12 kabupaten/kota di Kawasan G-12, dimana pembangunan di kawasan inti (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo) lebih maju dibandingkan kawasan pendukung

(Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan) maupun kawasan pengaruh (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan). Karena itu, dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah tadi, proyeksi laju pertumbuhan ekonomi sepanjang rentang waktu 2006-2015 – dan pada gilirannya investasi – untuk ketiga kategori kawasan tersebut diakselerasi dengan kelipatan sebagai berikut :

- Kawasan inti rata-rata 2,01 kali dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi periode 2001-2005.

- Kawasan pendukung rata-rata 2,19 kali dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama jangka waktu 2001-2005.
- Kawasan pengaruh rata-rata 2,44 kali dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sepanjang kurun waktu 2001-2005.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Kawasan G-12 untuk rentang waktu 2006-2015 diakselerasi sebesar 2,07 kali dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi periode 2001-2005.

Tabel 5. Proyeksi Nilai Investasi yang Dibutuhkan Kabupaten/Kota di Kawasan G-12, 2006-2015 (Rp miliar)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gresik	4.958,65	5.761,24	6.695,77	7.788,87	9.072,93	10.587,48	12.380,91	14.512,68	17.056,08	20.101,71
Bangkalan	584,11	662,11	749,50	847,78	958,71	1.084,34	1.227,07	1.389,71	1.575,57	1.788,58
Kab Mojokerto	1.305,17	1.522,24	1.772,14	2.061,42	2.398,00	2.791,46	3.253,46	3.798,23	4.443,19	5.209,75
Kota Mojokerto	344,91	377,94	414,52	455,11	500,18	550,29	606,07	668,23	737,59	815,06
Surabaya	21.058,73	24.055,70	27.498,58	31.467,29	36.057,15	41.382,19	47.579,16	54.812,52	63.280,51	73.222,72
Sidoarjo	5.706,59	6.479,71	7.358,26	8.360,00	9.505,91	10.820,79	12.334,02	14.080,55	16.102,00	18.448,08
Lamongan	1.083,82	1.273,49	1.492,33	1.746,40	2.043,07	2.391,26	2.801,94	3.288,52	3.867,57	4.559,56
Bojonegoro	837,88	919,41	1.008,72	1.106,76	1.214,57	1.333,36	1.464,47	1.609,41	1.769,92	1.947,95
Tuban	1.326,56	1.586,19	1.889,98	2.248,10	2.673,15	3.180,78	3.790,52	4.526,90	5.420,81	6.511,36
Jombang	1.548,04	1.864,05	2.236,27	2.678,23	3.206,81	3.843,15	4.613,93	5.552,90	6.703,07	8.119,42
Kab Pasuruan	1.218,65	1.376,40	1.553,21	1.752,06	1.976,46	2.230,46	2.518,83	2.847,13	3.221,91	3.650,88
Kota Pasuruan	316,19	366,27	424,34	491,96	571,04	663,88	773,32	902,78	1.056,48	1.239,62
Kawasan G-12	40.255,47	46.199,57	53.025,47	60.895,11	70.002,05	80.578,43	92.903,47	107.313,92	124.217,13	144.107,14

Sumber : Hasil perhitungan dan proyeksi (2006).

3.8.2. Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Penciptaan Keseimbangan Pembangunan Intrakawasan

Merujuk pada *diseconomies of scale*, penurunan daya saing, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang berlangsung di Kawasan G-12 sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka percepatan pengembangan ekonomi Kawasan G-12 harus dibingkai dalam kerangka Peningkatan Daya Saing dan Penciptaan Keseimbangan Pembangunan Intrakawasan. Dengan kerangka ini, kebijakan pengembangan ekonomi Kawasan G-12 difokuskan pada :

1. Meningkatkan pertumbuhan produktivitas (*productivity growth*) melalui :

- Pengembangan kawasan-kawasan industri yang terdapat di Kawasan G-12 menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) guna meningkatkan penanaman modal asing dan domestik berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

- Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan industri untuk mempercepat pengembangan ekonomi di kawasan pendukung dan kawasan pengaruh.
 - Peningkatan investasi di sektor-sektor maupun komoditas dan jasa unggulan yang terdapat di setiap kabupaten dan kota dalam Kawasan G-12.
 - Pengembangan integrasi berbagai jenis kegiatan ekonomi intrakawasan G-12 maupun dengan kawasan-kawasan di luar Kawasan G-12.
2. Memeratakan distribusi pendapatan (*income distribution*), antara lain dengan cara pengalihan sebagian fungsi ekonomi yang ada di kawasan inti ke kawasan pendukung dan kawasan pengaruh.
3. Memperluas kesempatan berusaha atau menekan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), antara lain melalui penciptaan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah

banyak (padat karya), terutama di kawasan pendukung dan kawasan pengaruh

4. Menjaga pembangunan agar tetap berkualitas dan berjalan secara berkesinambungan (*sustainable development*), antara lain dengan cara pemanfaatan sumberdaya alam secara seimbang sesuai dengan daya dukung lahan, fungsi ruang, dan fungsi lingkungan.

4. KESIMPULAN

Dalam era globalisasi sekarang ini, dimana intensitas persaingan semakin meningkat, peningkatan daya saing (*competitiveness enhancement*) harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di level nasional, kawasan, industri, perusahaan, maupun masyarakat. Hal ini berlaku pula bagi Kawasan Gerbangkertosusila. Kata daya saing menjadi sangat penting untuk mempertahankan eksistensi kawasan ini dalam persaingannya dengan kawasan-kawasan lain, terutama di level nasional.

Untuk meningkatkan daya saingnya, Kawasan Gerbangkertosusila harus mengkaji ulang kembali, faktor-faktor apa saja yang telah membuat daya saing kawasan ini melemah dalam beberapa tahun terakhir, serta faktor-faktor apa saja yang telah mampu meningkatkan daya saing kawasan ini. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Kawasan Gerbangkertosusila dapat menyusun sebuah perencanaan ke depan yang berorientasi pada peningkatan daya saing kawasan.

Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan kandungan teknologi (*technology for competitiveness enhancement*) yang melekat pada faktor-faktor produksi dan pascaproduksi, baik sumberdaya manusia, sumberdaya kapital, organisasi produksi, sistem informasi, maupun sumberdaya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Altenburg, Tilman; Wolfgang Hillebrand; and Jörg Meyer-Stamer. 1998. "Building Systemic Competitiveness : Concept and Case Studies from Mexico, Brazil, Paraguay, Korea and Thailand," *Reports and Working Papers*, 3/1998.

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). 2006. "Perkembangan Penanaman Modal", *Laporan Bulanan*, September.

BPM Provinsi Jawa Timur. 2006. *Data Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur*, Surabaya.

BPS (Badan Pusat Statistik). Beberapa edisi. *Statistik Ekspor*, Jakarta.

Budd L. and Hirmis A. K. 2004. "Conceptual Framework for Regional Competitiveness," *Regional Studies*, Volume 38, Number 9, December.

<http://encyclopedia.thefreedictionary.com>.

<http://www.cr1.dircon.co.uk>.

IMF (International Monetary Fund). 2006. *International Financial Statistics*, May.

Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2005. *Statistik Usaha Kecil dan Menengah 2005*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 538/KMK.07/2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah. *Lampiran*.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), USAID, dan The Asian Foundation. 2005. *Daya Saing Investasi 228 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2005*.

KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), USAID, dan The Asian Foundation. 2004. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2003 : Persepsi Dunia Usaha*.

Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Penerbit Erlangga, Desember.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2005. "Regional Competitiveness," dalam <http://www.oecd.org/document/37/>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah. *Lampiran*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2006. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2005*, Surabaya.

